

IMPLEMENTASI ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN (ATSP) TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI JAWA BARAT

Muhammad Farhan, Budi Setiawan

Fakultas Seni Kuliner Dan Pariwisata, Universitas Pradita, Tangerang, Indonesia
Email: muhammad.farhan@student.pradita.ac.id, budi.setiawan@pradita.ac.id

ABSTRAK

kata kunci:

ASEAN, ATSP,
Pengembangan
Pariwisata, Provinsi
Jawa Barat

keywords:

ASEAN, ATSP, Tourism
Development, West
Java Province

Pengimplementasian Asean Tourism Strategic Plan (ATSP) ini merupakan sebuah penjabaran dari sebuah strategi yang sangat cocok untuk diterapkan ke dalam sektor pariwisata Asean yang memfokuskan kepada salah satu daerah di Indonesia, diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam, buatan, dan juga budaya. Penelitian ini ada penelitian kualitatif yang menekankan pada kualitas dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Penelitian kualitatif juga lebih kritis dari perspektif proses daripada hasil yang dicapai. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan sampel dalam penelitian ini pun sama dengan populasi. Hasil analisis dari implementasi Atsp di Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan ide pengembangan pariwisata yang diterapkan melalui indeks daya saing wisata penentuan wilayah-wilayah yang akan menjadi fokus kawasan wisata unggulan, penerapan kebijakan yang selaras dengan kebijakan Asean dan nasional, serta penentuan daerah-daerah mana yang terlebih dahulu difokuskan dalam proyeksi pengembangan daya tarik wisata di salah satu kawasan wisata unggul. Atsp sudah diimplementasikan dengan baik di provinsi jawa barat, kebijakan yang dikembangkan sudah selaras dengan asean dan nasional, indeks daya saing wisata yang sudah diterapkan oleh provinsi jawa barat juga sudah melebihi dari total 7 indeks utama serta sudah berlaku dari tahun 2017 hingga 2023.

The implementation of the ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) in this context represents a tailored strategy suitable for application in the ASEAN tourism sector, focusing on one region in Indonesia, specifically West Java Province, known for its natural, artificial, and cultural wealth. This qualitative study emphasizes quality through interviews, direct observations, and relevant official documents. Qualitative research critically examines processes rather than just the outcomes. the study population comprises the West Java Provincial Tourism Office, with the sample matching the population. Analysis reveals that the implementation of ATSP in West Java Province has successfully integrated tourism development ideas. This includes the application of the tourism competitiveness index to determine key tourism areas, alignment of policies with ASEAN and national policies, and prioritization of specific regions for tourism attraction development projects in selected prominent tourism zones. ATSP has been effectively implemented in West Java, evidenced by policies that align with ASEAN and national guidelines, and the tourism competitiveness index surpassing the set benchmark of 7 key indicators, effective from 2017 to 2023...

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

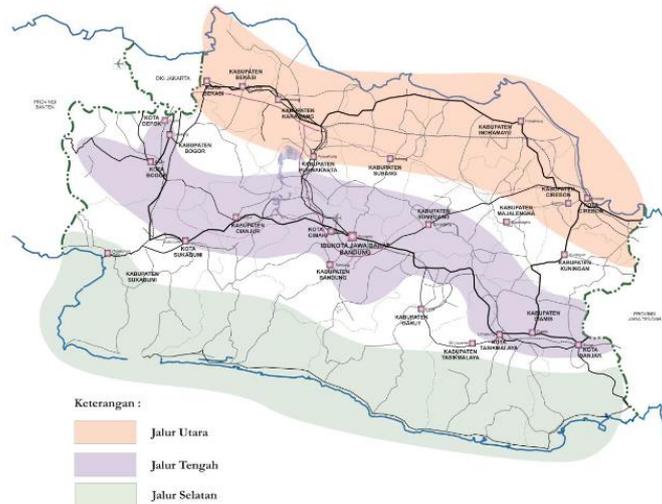
Pariwisata Indonesia sudah mulai berkembang dengan pesat khususnya dalam potensi ekonomi kreatif pasca pandemi Covid-19, maka dari itu diperlukannya pengelolaan potensi sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan industri pariwisata yang terus bergerak maju dalam berbagai sub-sektor tersebut (Manurung et al., 2025). Menurut Prayogo (2018), pariwisata mudah untuk didefinisikan sebagai sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, untuk dijadwalkan dengan tujuan rekreasi selama periode waktu tertentu dan untuk memenuhi keinginannya. Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya bekerja sama dengan para negara anggota *Asean* (Deni & Sopian, 2017).

Pertumbuhan industri pariwisata di negara-negara anggota *ASEAN* menjadi bagian pendorong bagi setiap anggotanya saling bekerja sama lebih erat melalui pembentukan *Asean Tourism Forum (ATF)* (Rachmalia, 2017), pembahasan dilakukan dalam forum tersebut berupa peninjauan perkembangan industri, menggagas ide baru, dan merekomendasikan percepatan pengembangan industri pariwisata (Primadani, 2018). Proyeksi forum ini dilaksanakan karena ada banyaknya wisata tunggal di daerah Asia Pasifik (Alfiyan Pujro Santoso & Nanang Darmawan, 2023).

Masyarakat *ASEAN* memiliki sebuah konsep dan cita-cita yang dalam pembentukan kelompok masyarakatnya didasarkan dari tiga pilar utama yang menopang keseluruhan kegiatan *ASEAN*, yaitu *ASEAN Economic Community (AEC)*, *ASEAN Security Community (ASC)*, dan *ASEAN Socio - Cultural Community (ASCC)* (Cahya et al., 2023). Indonesia telah memformulasikan *master plan* dari *ASEAN Connectivity*, dalam *master plan* tersebut telah memaparkan tujuan, hasil, serta juga hambatan yang akan terjadi pada saat mengimplementasikan rencana ini (Julianty, 2017). *Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC)* ini menghimbau agar negara – negara anggota *ASEAN* untuk bersinergi dalam memprioritaskan pariwisata sebagai usaha masa depan setiap negaranya. Dalam *MPAC* sendiri memprioritaskan tentang mengembangkan fasilitas fisik yang akan menunjang kegiatan berwisata di setiap negara anggota *ASEAN*. Indonesia sebagai tuan rumah *Asean Tourism Forum (ATF)* telah melaksanakan tugasnya pada tanggal 2 – 5 Februari 2023 di Yogyakarta, dalam forum ini Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf) secara resmi membuka acara tersebut dalam pernyataannya beliau menghimbau kontribusi dari setiap organisasi yang bergerak di bidang pariwisata untuk membantu keberhasilan pengimplementasian *Master Plan Asean Connectivity* dan *Asean Tourism Strategic Plan (ATSP)* berhasil di Indonesia secara menyeluruh.

Master Plan Asean Connectivity secara garis besar membahas tentang isu yang menjadi prihatin banyak pihak, seperti berlebihnya jumlah alat transportasi pribadi tetapi kurangnya pengimplementasian kendaraan umum untuk menunjang segala kegiatan di negara tersebut. Salah satu hal penting yang terlahir dari rencana *Master Plan Asean Connectivity (MPAC)* adalah *Asean Tourism Strategic Plan (ATSP)* yang didalamnya juga membahas isu transportasi untuk menunjang kegiatan pariwisata. *ATSP* adalah sebuah rangkaian rencana yang berdasar pada *Asean Tourism Strategic Marketing (ATSM)* adalah dasar dari rangkaian rencana ini telah diadopsi oleh Menteri – menteri dari setiap negara anggota *Asean* pada tahun 2012. *ATSP* secara umum membahas tentang membangun blueprint yang terkait dengan kebijakan, program, dan proyek dalam area pemasaran, pengembangan produk, pengembangan sumber daya manusia dari masing - masing daerah, investasi, dan komunikasi antar negara anggota *Asean*. di Indonesia pada tahun 2014 Presiden Indonesia bapak Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan poros maritim kebijakan ini menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam kebijakan ini banyak sektor yang disebutkan bisa menjadi sektor yang berpotensi dikembangkan dan menghasilkan untuk negara Indonesia khususnya pariwisata serta pelestarian budaya (Muda & Angelia, 2018).

Pengimplementasian *Asean Tourism Strategic Plan (ATSP)* ini merupakan sebuah penjabaran dari sebuah strategi yang sangat cocok untuk diterapkan ke dalam sektor pariwisata *Asean* yang memfokuskan kepada salah satu daerah di Indonesia, diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam, buatan, dan juga budaya. Ketiga elemen inilah yang membuat daerah tersebut dapat dijadikan sebagai bagian pendukung untuk menjadi daya tarik wisata (Pranando & Fitri, 2023).



Gambar 1. Perkembangan Kawasan Wisata di 3 Jalur Utama Jawa Barat

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020

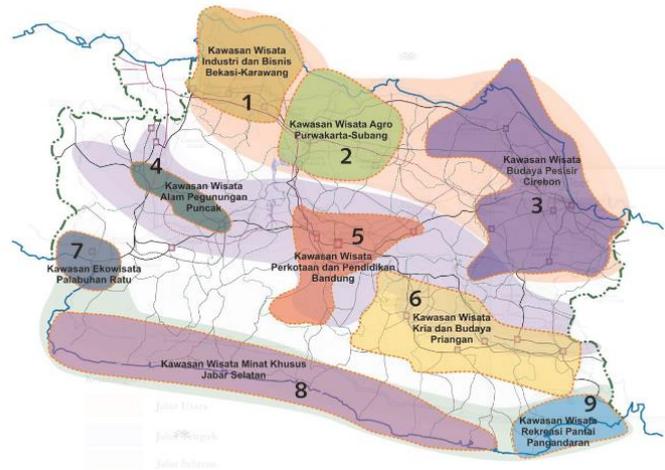
Provinsi Jawa barat memiliki 3 aspek yang dijadikan sebagai prioritas untuk pengembangan pendapatan daerahnya, 3 aspek ini sesuai dengan aspek pariwisata, yaitu : Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Barat

Wilayah	Tahun	Jumlah Daya Tarik Wisata		
		Alam	Budaya	Buatan
Provinsi Jawa Barat	2019	1550	523	614
	2020	1174	622	787
	2021	1502	741	537

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022

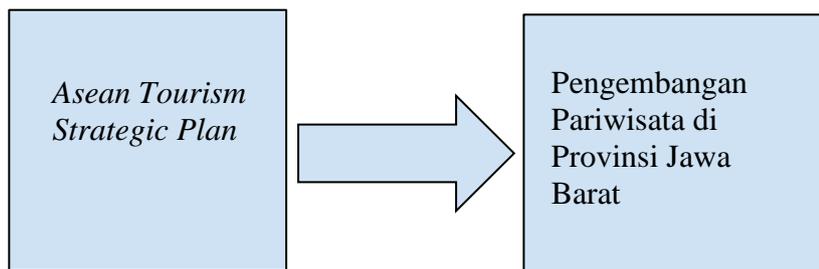
Provinsi Jawa Barat juga sangat diuntungkan jika melihat wilayah administratifnya, dilihat dari aspek aksesibilitas Provinsi Jawa Barat dilewati oleh 3 jalur darat yang sehari - hari digunakan untuk melintasi seluruh kepulauan Jawa, 3 jalur tersebut yaitu jalur utara, jalur selatan, dan jalur tengah. Provinsi Jawa Barat juga memetakan kawasan wisata unggulannya yang memiliki 9 lokasi yang dipetakan secara menyeluruh di Provinsi Jawa Barat, yaitu: kawasan industri dan bisnis antara Bekasi-Karawang, kawasan wisata Agro Purwakarta-Subang, kawasan wisata budaya Pesisir Cirebon, kawasan wisata alam Pegunungan Puncak, kawasan wisata perkotaan dan pendidikan Bandung, kawasan wisata kriya dan budaya Priangan, kawasan ekowisata Pelabuhan Ratu, kawasan wisata minat khusus Jawa Barat Selatan, dan kawasan wisata rekreasi Pantai Pangandaran.



Gambar 2. Sembilan Kawasan Wisata Unggulan Provinsi Jawa Barat
 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020

Hasil dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi ATSP dalam pengembangan pariwisata di provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan terbentuknya rumusan masalah mengenai implementasi ATSP di provinsi Jawa Barat yang berkesinambungan dengan empat indeks dari tujuh indeks yang digunakan sebagai acuan dasar provinsi tersebut, serta untuk menjadikan wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu kawasan wisata terpadu berskala nasional.



Gambar 3. Model Penelitian
 Sumber : Data hasil Olah Peneliti, 2023

Literature Review

Asean Tourism Strategic Plan (ATSP) merupakan sebuah ide gagasan yang dirumuskan oleh ASEAN guna untuk menjadikan wisata di kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan wisata tunggal yang dapat menyaingi wisata tunggal Asia Pasifik (Dioko, 2021) terdapat dua arah strategi yang digagaskan oleh Asean melalui strategi ini, yaitu Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai destinasi pariwisata tunggal, dan memastikan pariwisata asean berkelanjutan dan inklusif. (Asean, 2015)

Rencana Strategis Pariwisata

Menurut peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 12 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenparekraf adalah susunan cara untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. dengan ini ada beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan rencana strategis pariwisata, seperti: Destinasi, Pemasaran, Industri, kelembagaan.

Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang tumbuh dengan sangat cepat, termasuk pertumbuhan kapasitas tempat hunian, populasi lokal dan lingkungan pariwisata berkembang serta membawa investasi baru di sektor pariwisata dan sektor pendukungnya. (Fattah, 2023). pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan karena sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan berdasarkan biaya implementasi perkembangan yang tidak terkendali di dalam negeri (Anugrah et al., 2021).

Pengembangan Pariwisata

Industri pariwisata dianggap sebagai faktor terkuat dalam menumbuhkan perekonomian sebuah negara pada sektor jasa di banyak negara. Pengembangan destinasi pariwisata sangat bergantung dengan faktor pendukungnya, seperti; sumber daya alam; sumber daya manusia; budaya; peraturan pemerintah; keuangan; andil masyarakat; persaingan. menurut (Hermawan, 2018) beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan pariwisata, antara lain sebagai berikut : dapat meningkatkan faktor ekonomi, sosial, dan budaya, pelestarian budaya dan peningkatan mutu hidup, kelangsungan kegiatan pariwisata.

Faktor-faktor pengembangan daya tarik wisata meliputi kombinasi daya tarik wisata dengan kegiatan yang unik, fasilitas pendukung, serta sosial (Subekti & Sjucho, 2024). Pengembangan pariwisata meliputi atraksi, aksesibilitas, amenities, pelayanan, dan kelembagaan pelengkap. (Nawang Sari & Rahmatin, 2022).

METODE PENELITIAN

Dilihat dari topik dan hasil yang diperoleh, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Studi kualitatif oleh Hendry et.al., (2019) adalah sebuah proses penelitian naturalistik yang mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial pengalaman. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Penelitian kualitatif juga lebih kritis dari perspektif proses daripada hasil yang dicapai. Ini karena rasio bagian-bagiannya apa yang sedang dipelajari jauh lebih jelas dengan mengamatinnya.

Teknologi sampel yang diungkapkan oleh Sugiyono, (2016) adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan sampel dalam penelitian ini pun sama dengan populasi yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Jumlah responden yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh responden yang memiliki latar belakang serta juga pegawai yang bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, yaitu : Bapak/Ibu Wakil Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Bapak/Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Terdapat 4 (empat) metode dalam menganalisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan serta memverifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Terhadap Pengembangan Pariwisata di Provinsi Jawa Barat

Meningkatkan Daya Saing ASEAN Sebagai Destinasi Pariwisata Tunggal

Tabel 2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Jawa Barat Linear Dengan Kebijakan Nasional

Kebijakan ASEAN	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jawa Barat
Diversifikasi Produk Pariwisata	Salah satunya dengan mengembangkan sport tourism secara internasional.	. Lebih melibatkan UMKM yang Terlibat Langsung dalam Perekonomian Kawasan Wisata Unggulan (KWU).
	menunjuk suatu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan pariwisata secara nasional maupun internasional, serta meningkatkan sarana prasarana wisata dari wisata yang sudah ada sebelumnya	.. Selalu Terlibat dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan dari Produk Wisata di Kawasan Wisata Unggulan

Sumber: Data hasil Olahan Peneliti, 2023

Pada bagian ini, fokusnya adalah pada pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh ASEAN untuk pengembangan pariwisata, yang berfokus pada pengembangan kerangka investasi yang lebih menguntungkan, peningkatan pelayanan pariwisata dan kualitas sumber daya manusia, promosi destinasi dan diversifikasi sumber daya pariwisata, mendiversifikasi produk, beralih ke tujuan tematik dan pengalaman sasaran serta metode pemasaran dan promosi produk yang lebih tinggi, merencanakan, merancang dan melaksanakan program dan proyek yang terkait dengan peningkatan dan perluasan infrastruktur, memfasilitasi perjalanan dan investasi lintas pembangunan infrastruktur destinasi.

Tabel 3. Data Perbandingan Wisata Unggul Asean dengan Jawa Barat

No	Kategori Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata Unggulan Asean	Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jawa Barat
1	Wisata Industri dan Bisnis	<i>Orchard Road, Chiang Mai Night Bazaar.</i>	Bekasi hingga Karawang
2	Wisata Agro	<i>Banaue Rice Terrace, Brunei Agro Technology Park</i>	Purwakarta hingga Subang
3	Wisata Budaya	<i>The Grand Palace, Bangkok National Museum, Vientiane Great Stupa, Yangon, Angkor Wat,</i>	Pesisir Cirebon
4	Wisata Alam	<i>Chocolate Hills, Genting Highlands, Khao Sok National Park, Vang Vieng, Phonsavan</i>	Pegunungan Puncak
5	Wisata Perkotaan dan Pendidikan	Kuala Lumpur, Singapore, Nay Pyi Taw,	Bandung
6	Wisata Kriya dan Budaya	<i>Batu caves, Bagan.</i>	Priangan
7	Ekowisata	<i>Municipality of Donsol, Sipadan Island,</i>	Pelabuhan Ratu
8	Wisata Minat Khusus	Halong Bay, Phu Quoc	Jawa Barat Selatan
9	Wisata Rekreasi	<i>Sand Dunes of Mui Ne, Sihanoukville</i>	Pantai Pangandaran

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2023

Keberagaman potensi pariwisata di Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan sebagai industri unggulan apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah pengembangan yang memiliki potensial yang lebih diikuti dengan pemerataan pembangunan di daerah administratif Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat mempunyai potensi pembangunan daerah yang beragam serta manfaatnya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan. Potensi tersebut didasari oleh permasalahan dan kebutuhan pembangunan Provinsi Jawa Barat ke depan serta realitas konektivitas daerah khusus berupa infrastruktur strategis yang telah dibangun di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi masyarakat, investasi yang perkembangannya harus diantisipasi, sebagai berikut :

1. Wilayah utara mempunyai potensi fisik yang luar biasa berupa dataran, eksisting merupakan lahan pertanian yang luas dan letak infrastruktur strategis meliputi konektivitas dengan Tol Cipali, Tol Cisumdawu, kereta cepat dan semi tinggi -stasiun kereta api cepat, serta outlet hub transportasi domestik dan internasional seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Pelabuhan Cirebon dan Bandara Kertajati di Majalengka.
2. Wilayah tengah, dengan potensi daerah pegunungan dan datar sebagian besar wilayah perkotaan rawan bencana alam, dan wilayah lainnya merupakan wilayah yang perlu dilindungi dan mempunyai titik panas potensi pariwisata. Perencanaan dan kerjasama pengelolaan kawasan perkotaan.
3. Wilayah selatan dengan potensi alam hingga lereng bergelombang dan risiko bencana alam yang tinggi memerlukan perhatian khusus untuk pembangunan, dengan prioritas diberikan pada optimalisasi kegiatan ekonomi berbasis pertanian, industri, kelautan terpadu dan pariwisata yang optimalisasi lahan, permasalahan pesisir dan maritim dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Konsep pembangunan wilayah Jawa Barat bagian Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan.

Pengembangan dan Meningkatkan Kemampuan serta Kualitas Manusia di Bidang Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Tabel 4. Kebijakan Pengembangan SDM di Provinsi Jabar Linear dengan Kebijakan Asean dan Nasional

Kebijakan ASEAN	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jawa Barat
Pengembangan dan Meningkatkan Kemampuan Serta Kualitas Manusia di Bidang Pariwisata	Meningkatkan Fokus Masyarakat untuk Menciptakan Lingkungan Pengembangan Pariwisata Melalui Gerakan Sadar Wisata.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Provinsi Jawa Barat, Serta Bekerja Sama dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta.
	1. Membangun ekosistem yang utuh untuk mengembangkan sumber daya manusia pariwisata melalui pengembangan standar keterampilan.	Sertifikasi resmi yang diakui pemerintah pusat bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata
	2. Membantu melatih pelatih dan penguji (evaluator).	

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2023

Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan pariwisata menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang membantu mempercepat perkembangan industri pariwisata, Pembangunan pariwisata ini meliputi:

1. sertifikasi keterampilan sumber daya manusia di bidang industri pelayanan pariwisata di seluruh wilayah administratif provinsi Jawa Barat
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memenuhi standarisasi Kemenparekraf.
3. Meningkatkan kualitas pariwisata beserta tenaga lulusan pendidikan tinggi terserap 100% ke pasar kerja dan terpilih untuk berpartisipasi dalam industri sekolah tinggi pariwisata, akademi dan politeknik

Pengembangan Strategi Promosi Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Barat

Tabel 5. Kebijakan Promosi di Provinsi Jabar Linear dengan Kebijakan Asean dan Nasional

Kebijakan ASEAN	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jawa Barat
Lebih Mengembangkan Aktivitas Promosi dan Pemasaran di Daerah Daya Tarik Wisata	Membangun Jaringan Komunikasi Pemasaran dengan Perwakilan Luar Negeri melalui Visit Indonesia Tourism Officer	Optimalisasi media untuk memperkenalkan pariwisata dan budaya di Jawa Barat.
	1. Berpartisipasi dalam acara periklanan dan pemasaran strategis di luar negeri.	Pembangunan terminal pariwisata terpadu di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pusat informasi pariwisata dan kegiatan pariwisata.
	2. Membangun Strategi Komunikasi Pemasaran berdasarkan Target Pasar.	Melakukan Kegiatan Pemasaran Pariwisata dengan Melibatkan Partisipasi Influencer Ternama.
		Menyelenggarakan program festival tahunan

Kebijakan ASEAN	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jawa Barat
		Melakukan Semua Kegiatan yang Termasuk dalam Lingkup Industri Pariwisata

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2023

Kebijakan promosi yang sudah dirumuskan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah selaras dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang digagaskan oleh Asean dan juga nasional, maka dari itu strategi promosi yang dilakukan akan berjalan dengan terpantau dengan baik oleh pemerintah dan juga bisa dijalankan dengan baik oleh pihak ketiga.

Indikator Implementasi *Asean Tourism Strategic Plan (ATSP)* pada Pengembangan Pariwisata di Provinsi Jawa Barat

Tabel 6. Indikator Perbandingan *National Tourism and Travel Competitiveness Index* dengan Indikator Daya Saing Wisata Provinsi Jawa Barat

No	National Tourism and Travel Competitiveness Index 2019-2023	Indikator Daya Saing Wisata Provinsi Jawa Barat 2022
1	<i>Travel And Tourism Policy And Enabling Condition (2 index and 11 sub- index)</i>	<i>Enabling Environment (5 index)</i>
2	<i>Travel And Tourism Environmental Sustainability (3 index and 13 sub- index)</i>	<i>Tourism and Travel Policy and Enabling condition (4 index)</i>
3	<i>Enabling Environment (5 index)</i>	<i>Infrastructure (3 index)</i>
4	<i>Tourism and Travel Demand Drivers (3 index)</i>	<i>Natural and Cultural Resources (2 index)</i>
5	<i>Infrastructure (3 index)</i>	

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2023

Banyak indeks yang digunakan sebagai acuan untuk membuktikan, akan tetapi keempat indeks ini yang digunakan Provinsi Jawa Barat dalam menentukan rencana pengembangan pariwisata, demikian penjabaran indeks acuan pengembangan pariwisata yang dilandaskan dari indeks daya saing wisata yang dirumuskan oleh *World Economic Forum*. Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Kriteria	Bobot AHP
Aspek Lingkungan Bisnis	0.111
Pertumbuhan Pasar (Kunjungan Wisata)	0.019
Lokasi Geografis (Aksesibilitas)	0.021
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	0.024
Kesiapan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	0.024
Ketersediaan Sumber Daya Manusia	0.023
Aspek Kebijakan Pariwisata	0.070
Sinergi Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Kawasan	0.016
Komitmen Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata	0.054
Aspek Infrastruktur	0.403
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar (Listrik dan Air Bersih)	0.022
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	0.042
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	0.111
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	0.228
Aspek Kekayaan Sumber Daya Alam dan Budaya	0.416
Keindahan Alam	0.029
Kekayaan Warisan Budaya	0.049
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	0.186
Risiko Terjadinya Bencana Alam	0.152

Gambar 4. Bobot Indeks Daya Saing wisata di Provinsi Jabar

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020

Melalui gambar diatas dapat disimpulkan bahwasanya aspek kekayaan sumber daya alam memiliki tingkat prioritas dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata, kemudian disusul oleh aspek infrastruktur, aspek lingkungan bisnis, dan pada posisi terakhir adalah aspek kebijakan pariwisata. Aspek lingkungan bisnis dengan bobot 0.111 mencakup beberapa kriteria penting. pertumbuhan pasar (kunjungan wisata) dengan bobot 0.019 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengunjung wisatawan memiliki tingkat kepentingan yang relatif rendah. Lokasi geografis (aksesibilitas) dengan bobot 0.021 menandakan bahwa aksesibilitas lokasi sedikit lebih penting dibandingkan pertumbuhan pasar wisata. Jaminan keamanan dan keselamatan dengan bobot 0.024 mengindikasikan pentingnya keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan. Kesiapan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan bobot 0.024 menunjukkan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi dianggap sama pentingnya dengan keamanan dan keselamatan. Ketersediaan sumber daya manusia dengan bobot 0.023 mengimplementasikan bahwa sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam aspek lingkungan bisnis pariwisata.

Aspek kebijakan pariwisata memiliki bobot 0.070. Sinergi pemerintah lokal dalam pembangunan kawasan dengan bobot 0.016 menandakan bahwa kerjasama pemerintah lokal dalam pembangunan kawasan pariwisata memiliki tingkat kepentingan yang sangat rendah. Komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata dengan bobot 0.054 menunjukkan bahwa dukungan dan komitmen pemerintah lebih signifikan dalam kebijakan pariwisata

Aspek infrastruktur, dengan bobot 0.403, menekankan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti listrik dan air bersih dengan bobot 0.022 mengindikasikan bahwa infrastruktur dasar penting tetapi tidak menjadi prioritas utama. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata dengan bobot 0.042 menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pariwisata memiliki kepentingan yang cukup tinggi. Ketersediaan sarana prasarana transportasi dengan bobot 0.111 menandakan bahwa transportasi merupakan faktor yang sangat penting. Terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan bobot 0.228 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan untuk wisatawan adalah prioritas utama dalam aspek infrastruktur.

Aspek kekayaan sumber daya alam dan budaya, dengan bobot 0.416, juga memiliki beberapa kriteria penting. Keindahan alam dengan bobot 0.029 menunjukkan bahwa estetika lingkungan alam sekitar destinasi pariwisata memiliki kepentingan yang cukup signifikan. Kekayaan warisan budaya dengan bobot 0.049 menandakan bahwa warisan budaya juga merupakan faktor penting yang menarik wisatawan. Lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan bobot 0.186 menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup sangat penting dalam aspek ini. Risiko terjadinya bencana alam dengan bobot 0.152 mengindikasikan bahwa risiko bencana alam juga merupakan pertimbangan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Hasil analisis dari implementasi ATSP di Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan ide-ide pengembangan pariwisata yang diterapkan melalui indeks daya saing wisata serta menghasilkan sebagai berikut: penentuan wilayah-wilayah yang akan menjadi fokus kawasan wisata unggulan, penerapan kebijakan daya wisata dan pengembangan sumber daya manusia serta strategi promosi yang selaras dengan kebijakan Asean dan nasional, serta penentuan daerah-daerah mana yang terlebih dahulu difokuskan dalam proyeksi pengembangan daya tarik wisata di salah satu kawasan wisata unggul.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian serta tujuan yang sudah dipaparkan dalam pendahuluan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)* terhadap Pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat, Yakni : Implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)* terhadap perkembangan pariwisata di provinsi Jawa barat sudah sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Asean dan dijalankan secara linear; berdasarkan hasil tabel di bagian pembahasan promosi, diversifikasi produk pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata provinsi jawa barat selalu dilakukan secara berkala dan tidak lepas dari pengawasan oleh pemerintah provinsi yang dimana dinas pariwisata dan budaya aktif lakukan dan perkenalkan kepada pihak swasta atau masyarakat; penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan pemerintah provinsi dalam melakukan pengembangan pariwisata sesuai dengan perkembangan dunia internasional, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang perkembangan pariwisata masih didominasi di kota kota besar, perlu dilakukannya hilirisasi yang merata terhadap perkembangan pariwisata di kesembilan daerah yang sudah direncanakan sebagai kawasan wisata unggulan; dan memperkuat kohesi dalam pengembangan pariwisata dengan fokus pada sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

alfiyanto Pujo Santoso, B., & Nanang Darmawan, R. (2023). Implementasi Asean Tourism Strategic (Atsp) Plan Dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi. *Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 1–13.

- Anugrah, F. F., Salahudin, S., & Nurjaman, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(4), 775–789.
- Cahya, D. D., Mamahit, D. A., Yusnaldi, Y., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Indonesia's Role In Realizing The Vision Of The Asean Economic Community (Aec) And The Asean Socio-Cultural Community (Ascc). *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, 2(6).
- Deni, F., & Sopian, P. (2017). Peran Asean Tourism Forum Dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia*, 2(2), 279–308.
- Dioko, L. D. O. N. A. N. (2021). *Philippine Tourism Vis-À-Vis Asean: A Review Of Key Issues. The Hospitality And Tourism Industry In Asean And East Asian Destinations*, 229–254.
- Fattah, V. (2023). *Ekonomi Pariwisata: Teori, Model, Konsep Dan Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. Publica Indonesia Utama.
- Hermawan, A. H. B. (2018). Model Pengembangan Ekonomi Pariwisata. *Media Wisata*, 16(1).
- Julianty, D. (2017). Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Sub-Regional Asean Dalam Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (Imt-Gt) Tahun 2007-2011. Universitas Hasanuddin. [https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/89562335.Pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/89562335.pdf).
- Manurung, G. G., Yana, M. T., Anesha, S., & Zuriana, K. Z. (2025). Meningkatkan Manajemen Sdm Sebagai Faktor Keunggulan Kompetitif Dalam Pariwisata Dan Industri Perhotelan. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(2).
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai Di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2022). Tantangan Dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Era New Normal. *Masyarakat Indonesia*, 47(1), 91–104.
- Pranando, Y. H., & Fitri, A. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(3), 93–101.
- Primadani, E. O. (2018). Dampak Asean Tourism Forum (Atf) Terhadap Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Uin Raden Intan Lampung*.
- Rachmalia, N. H. (2017). *Peran Asean Tourism Forum (Atf) Untuk Pengembangan Kepentingan Pariwisata Indonesia Dan Thailand*. Perpustakaan.
- Subekti, P., & Sjachro, D. W. (2024). Strategi Komunikasi Di Pesisir Pantai Wisata Peluang Dan Tantangan Bagi Wirausahawan Baru. *Jurnal Signal*, 12(1), 42–57.